

## DETERMINAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI TRANSPARANSI

<sup>1</sup>Moh. Syadeli

*STIE Malangkeucecwara Malang*

### *Abstract*

*This research is intending to examine the impact of determinant (capacity of villages apparatus, obedience of money management, surveillance of BPD) towards the performance of villages money management through transparency. The research is done by 19 villages with 256 respondents as a total. Method of analysis is using Partial Least Square (PLS) with transparency as an intervening.*

*Result of the research shows that determinant (capacity of villages apparatus, obedience of money management, surveillance of BPD) gives positive impacts to the performance of villages money management. On the other hand, result of examination of interaction (intervening) shows that transparency gives positive impacts to the performance of villages money management. Capacity of villages apparatus is not giving any positive impacts to the performance of villages money management through transparency.*

**Keywords:** *Capacity of Villages Apparatus, Obedience of Money Management, Surveillance of BPD and Transparency.*

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh determinan (kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, pengawasan BPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Penelitian dilakukan terhadap 19 desa dengan jumlah 285 responden. Metode analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan transparansi sebagai intervening.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan (kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD) berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian interaksi (intervening) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Sementara ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan melalui transparansi dan pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi.*

**Kata Kunci:** *Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Pengawasan BPD dan Transparansi*

## **Pendahuluan**

Pemerintah saat ini sedang berfokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa diantaranya Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pemendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>1</sup> Email Address : [syadeli@stie-mce.ac.id](mailto:syadeli@stie-mce.ac.id)

Received 8 Maret 2021, Available Online 1 Juli 2021

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 “dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)”. PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh kinerja aparatur desa.

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki.

Menurut Finta dan Heru (2017) terdapat beberapa “determinan (faktor yang menentukan) yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa antara lain kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD”. Kapasitas Aparatur desa adalah kemampuan individu yang harus dimiliki oleh Aparatur desa yang meliputi pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam mengelola keuangan desa. Kapasitas Aparatur desa yang baik akan mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan keuangan desa, karena kapasitas Aparatur desa merupakan modal utama dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Ketaatan pelaporan keuangan desa juga mempengaruhi kinerja karena jika pemerintah desa tidak menyajikan laporan keuangan secara tertib maka akan menurunkan kinerjanya. Pengawasan BPD juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan kinerja. Karena pengawasan BPD akan memberikan *feedback* bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja akan semakin baik. Transparansi juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kinerja. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan determinan (faktor penentu) yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, masih sangat terbatas dan terjadi *research gap*. Jaitun (2013) menemukan bahwa “kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, dan tanggung jawab merupakan determinan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa”. Sementara penelitian yang dilakukan Adha (2016) menemukan bahwa salah satu “determinan yang mempengaruhi kinerja Aparatur desa ialah adanya pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai determinan kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji pengaruh determinan (kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD) terhadap kinerja keuangan desa melalui transparansi. Penelitian ini dilakukan terhadap Aparatur Desa, BPD, dan LPM di beberapa desa di kecamatan Geger, kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa; (2) Apakah ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa; (3) Apakah pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh terhadap kinerja

pengelolaan keuangan desa ; (4) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ; (5) Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi; (6) Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi; dan (7) Apakah pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi?

## **Tinjauan Pustaka**

### **Akuntansi Desa**

Akuntansi desa memiliki beberapa pengertian. Salah satu pengertian Sujarweni (2015:17) mendefinisikan “akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa”.

### **Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Sebagaimana dikemukakan oleh Moehariono (2012), “kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang organisasi”. Selanjutnya Mangkunegara (2007) membagi “kinerja dalam dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi”. Kinerja perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (Wibowo, 2011). “Dari segi keuangan, kinerja merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas” (Jumingan, 2006; Yuliyanti, 2014).

### **Determinan yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Determinan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memiliki defisini faktor yang menentukan. Menurut Finta dan Heru (2017) terdapat beberapa determinan (faktor yang menentukan) yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa antara lain kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD.

### **Kapasitas Aparatur Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

“Kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan” (Mouallem dan Analoui, 2014). “Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional” (Rafar et al., 2015).

## Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

“Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar” (Mudhafir, 1996). Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang kinerja perusahaan atau lembaga selama satu periode dan untuk pengambilan keputusan.

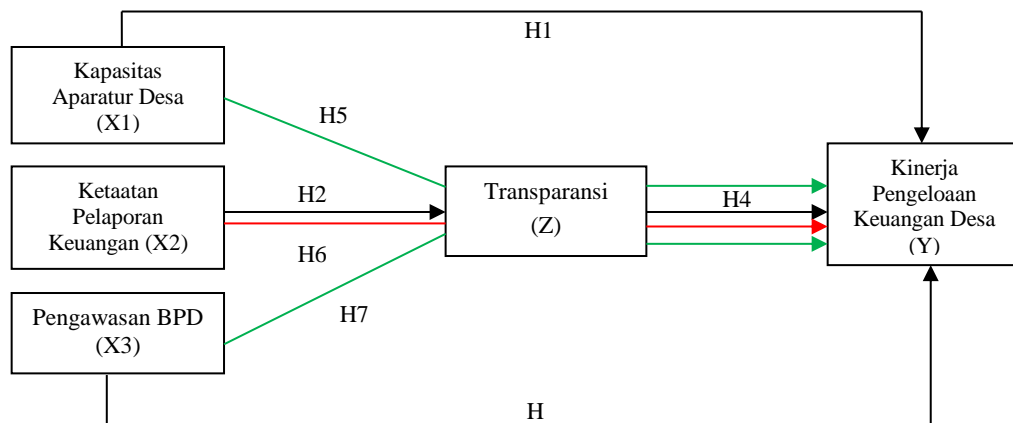
## Pengawasan BPD dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

“Pengawasan adalah proses dimana manajemen ingin mendapatkan informasi tentang apa yang bawahan kerjakan dan kesesuaiannya dengan perintah, rencana perintah, tujuan, kebijakan yang telah disepakati” (Maringan, 2004). Menurut Permedagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD adalah institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis.

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Kualitas pengawasan dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut (Manullang, 2008:184): (1) Skedul pengawasan, (2) Standarisasi pengawasan, (3) Hubungan timbal balik (Feedback).

## Transparansi

Hari Sabarno (2010:38) “transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.



Gambar 1. Model Hipotesis

## Pengembangan Hipotesis

### *Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa*

Penelitian yang telah dilakukan oleh Munti F dan Fahlevi H (2017) telah membuktikan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aristia (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan aparatur desa dalam hal kapasitas sumber daya manusia yaitu

pengetahuan sangat menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan desa tersebut. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkat kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

**H1 : Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**  
**Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Penelitian yang telah dilakukan oleh Munti F dan Fahlevi H (2017) telah membuktikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan kalimat lain, semakin taat aparatur desa dalam melaporkan keuangannya maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait ketaatan pelaporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :

**H2 : Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pengaruh Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Maringan, 2004 mengartikan pengawasan adalah proses dimana manajemen ingin mendapatkan informasi tentang apa yang bawahan kerjakan dan kesesuaiannya dengan perintah, rencana perintah, tujuan, kebijakan yang telah disepakati. Penelitian yang dilakukan oleh Munti F dan Fahlevi H (2017) menghasilkan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa terhadap pembangunan. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait ketaatan pelaporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah :

**H3 : Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Risya dan Idang (2017) telah membuktikan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risya dan Idang (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan desa, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah :

**H4 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

### ***Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi***

Tjiptoherianto et al. (2010) menjelaskan kinerja dan kualitas kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. penelitian yang dilakukan oleh Risyah dan Idang (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait kapasitas aparatur desa dan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, maka hipotesis kelima yang diajukan adalah :

*H5 : Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi*

### ***Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi***

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Penelitian yang telah dilakukan oleh Munti F dan Fahlevi H (2017) telah membuktikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Risyah dan Idang (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait ketaatan pelaporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, maka hipotesis keenam yang diajukan adalah :

*H6 : Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi*

### ***Pengaruh Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi***

Maringan, 2004 mengartikan pengawasan adalah proses dimana manajemen ingin mendapatkan informasi tentang apa yang bawahan kerjakan dan kesesuaiannya dengan perintah, rencana perintah, tujuan, kebijakan yang telah disepakati. Penelitian yang dilakukan oleh Ari (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa terhadap pembangunan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risyah dan Idang (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan dari beberapa argumen serta bukti empiris terkait pengawasan BPD dan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, maka hipotesis ketujuh yang diajukan adalah :

H7 : Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas bertujuan menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Desain penelitian kausalitas ini berbentuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan variabel mediasi/intervening. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 19 Desa yang terdaftar di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pemilihan responden ini menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk menentukan kriteria berdasarkan ketersediaan data, letak desa dari penelitian responden. Dalam penelitian ini menggunakan responden perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa (LPKMD). Total sampel yang digunakan sebanyak 285 responden.

### Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Berdasarkan hipotesis, maka secara operasional variabel dapat didefinisikan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Indikator**

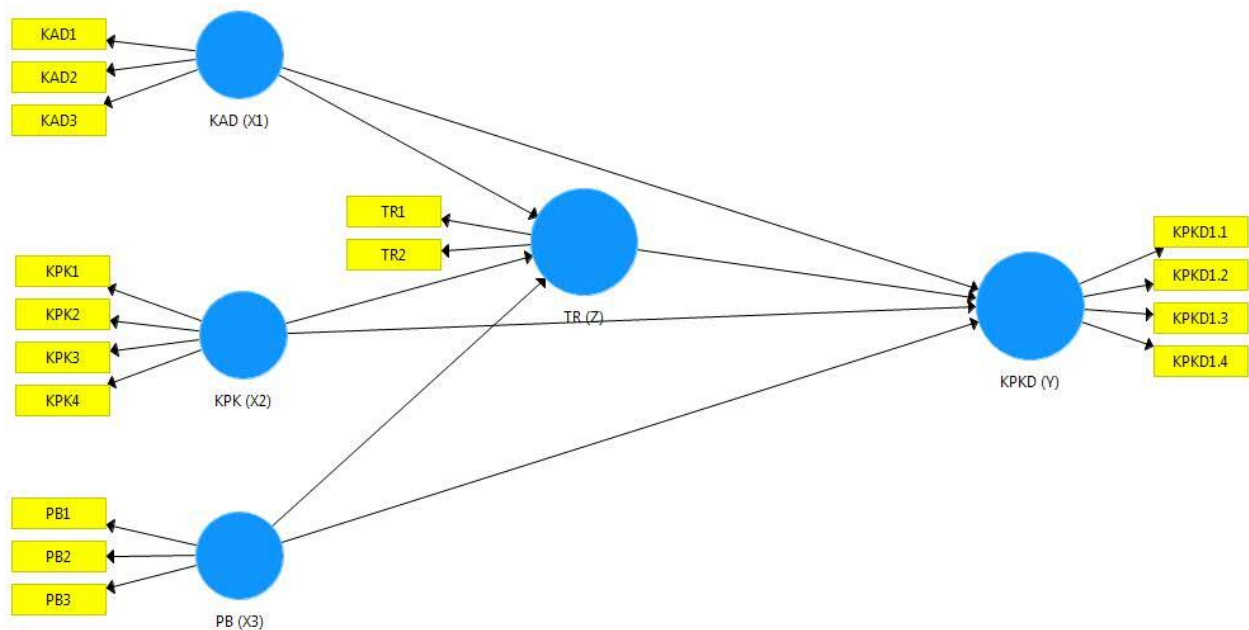
Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<b>Kinerja Pengelolaan Keuangan desa (Y)</b>	Hasil kerja suatu atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Ekonomis 4. Pelaporan yang memadai
<b>Kapasitas Aparatur desa (X1)</b>	Kemampuan individu yang harus dimiliki oleh aparatur desa meliputi pemahaman, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.	1. Pemahaman 2. Keterampilan 3. Kemampuan
<b>Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2)</b>	Kesediaan untuk tunduk terhadap hukum/aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi dan peraturan.	1. Transparansi 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib administrasi dan taat peraturan
<b>Kualitas Pengawasan BPD (X3)</b>	Kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan aparatur desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai peraturan yang berlaku.	1. Skedul pengawasan 2. Standarisasi pengawasan 3. Hubungan timbal balik ( <i>feedback</i> )
<b>Transparansi (Z)</b>	Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya harus transparansi atau dikelola secara terbuka. Sehingga masyarakat dapat mengetahui.	1. Penyediaan informasi yang jelas 2. Kemudahan akses informasi

## Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup, dimana pernyataan telah memiliki alternatif jawaban (*option*), yaitu berdasarkan skala *likert*.

## Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) yang digunakan dalam membuat analisa dan kesimpulan bagaimana hasil penelitian ini. Terdapat tiga bagian analisis yang harus dilakukan dalam PLS, yaitu: (1) Menilai *outer model* atau *measurement model*, (2) Menilai *Inner Model* atau *Structural Model*, (3) Mentukan diagram jalur. Berikut ini ilustrasi model structural.



## Hasil Dan Pembahasan

### Pengujian Model dan Hipotesis

#### Analisis Outer Model

Pengujian Outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Nilai dari result for outer loading harus  $> 0.7$  dikatakan valid. Setelah itu melihat discriminant validity dengan result for cross loadingnya nilai setiap konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan konstruk lain. Untuk croncbach's Alpha nilainya  $> 0.6$  dikatakan reliabel.

#### Analisis Inner Model

Analisis inner model dilakukan untuk memastikan bahwa model yang struktural yang dibangun robust dan akurat. Dengan melihat nilai R square,  $Q^2$ , dan GoF.



## Pengujian Hipotesis

**Tabel 2 Path Coeficients (Mean, STDEV, T-Value) Pengaruh langsung**

<i>Variabel</i>	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>	<b>Kesimpulan</b>
KAD -> KPKD	0.173	0.077	2.239	0.026	Diterima
KPK -> KPKD	0.376	0.099	3.788	0.000	Diterima
PB -> KPKD	0.462	0.101	4.570	0.000	Diterima
TR -> KPKD	0.145	0.040	3.614	0.000	Diterima

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan table 2 dapat dikatakan bahwa nilai *T Statistic* dari variabel independen (Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Pengawasan BPD, dan Transparansi) lebih besar dari *T Tabel* 1,968 dan *P Values* semua variabel independen lebih kecil dari 5%, sehingga hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat diterima

**Tabel 3 Path Coeficients (Mean, STDEV, T-Value) Pengaruh Tidak Langsung**

<b>Variabel</b>	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P Values</b>	<b>Kesimpulan</b>
KAD -> TR -> KPKD	0.026	0.019	1.373	0.171	Ditolak
KPK -> TR -> KPKD	-0.005	0.019	0.269	0.788	Ditolak
PB -> TR -> KPKD	0.067	0.022	2.992	0.003	Diterima

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan table 3 dapat dikatakan bahwa nilai *T Statistic* dari variabel independen (Kapasitas Aparatur Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan), masing masing nilainya lebih kecil dari *T Tabel* sebesar 1,968 dengan signifikansi *P Values* lebih besar dari 5% menandakan bahwa Kapasitas Aparatur Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, sehingga hipotesis kelima dan keenam ditolak

Berbeda dengan 2 variabel independen (Kapasitas Aparatur Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan), variabel Pengawasan BPD mempunyai nilai *T Statistic* 2.992 lebih besar dari *T Tabel* sebesar 1,968 dengan signifikansi *P Values* lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima.

### ***Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa***

Kapasitas aparatur desa berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan alasan untuk merekrut aparatur desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.

### ***Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa***

Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa dapat

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh semakin taat aparat desa dalam membuat pelaporan keuangan desa maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan diberikannya wewenang tersebut pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten.

### ***Pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa***

Pengawasan BPD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengawasan BPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa karena dari pengawasan tersebut akan membuat aparat desa lebih taat dalam membuat maupun menyampaikan laporan keuangan Desa serta agar aparat desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### ***Pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa***

Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi tentang pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan penggunaan sistem akuntansi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin khususnya dalam implementasi pengelolaan keuangan desa yang mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.

### ***Pengaruh kapasitas aparat desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi***

Kapasitas aparat desa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Hal ini disebabkan kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga aparat desa yang mempunyai kualitas yang baik dalam pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam bidangnya tidak akan berpengaruh terhadap transparansi. Dengan kata lain, badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan sudah sangat maksimal. Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dilakukan sebulan sekali, memiliki standarisasi pengawasan yang dijadikan acuan, serta adanya *feedback* dari aparat desa saat dilakukan pengawasan serta 19 desa yang diteliti pada Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah menggunakan aplikasi SisKeuDes yang mempermudah pekerjaan aparat desa dalam membuat maupun melaporkan laporan keuangan sehingga mengakibatkan transparansi tidak berpengaruh.

### ***Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi***

Ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Hal ini disebabkan kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga aparat desa yang membuat kesalahan dalam penyusunan maupun pelaporan laporan keuangan akan dikoreksi oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Dengan kata lain, badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan sudah sangat maksimal. Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dilakukan sebulan sekali, memiliki standarisasi pengawasan yang dijadikan acuan, serta adanya *feedback* dari aparat desa saat dilakukan pengawasan serta 19 desa yang diteliti pada Kecamatan Geger

Kabupaten Madiun telah menggunakan aplikasi SisKeuDes dimana semua laporan dapat diselesaikan tepat waktu karena telah terprogram dari aplikasi. Sehingga aparat desa tidak mampu membuat laporan maupun melaporkan laporan keuangan sesuai keinginan atau perintah pihak tertentu sehingga mengakibatkan transparansi tidak berpengaruh

### ***Pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi***

Pengawasan BPD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Dengan kata lain, semakin tinggi transparansi yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan sudah sangat maksimal. Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dilakukan sebulan sekali, memiliki standarisasi pengawasan yang dijadikan acuan, serta adanya *feedback* dari aparat desa saat dilakukan pengawasan.

### **Kesimpulan**

Kapasitas aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, pengawasan BPD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, kapasitas aparat desa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi, dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi.

### **Daftar Pustaka**

- Adha, A, H. 2016. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Sawo Kabupaten Rokan Hulu. *Jom FISIP*, 3(2), page 1-15,
- Hehanusasa, S. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. ISSN 2302-9791, 2(1), 82-90
- Husna, S dan Abdullah, S. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282-
- Jaitun. 2013. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintah Integratif*, 1(1), 13-27.
- Munti, F dan Fahlevi, H. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Biruen Aceh.
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Wijaya, D. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media